

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks pergantian kekuasaan sebagai akibat tuntutan demokrasi dari rezim lama kepada rezim baru, ternyata di beberapa daerah menimbulkan persoalan. Tajamnya perebutan dan kepentingan politik antar kekuatan politik maupun intra kekuatan politik, mengakibatkan konflik yang seringkali tidak terhindarkan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Rivalitas politik, kadang-kadang bukanlah semata-mata sebagai akibat dari perbedaan persepsi, melainkan perbedaan kepentingan antar kekuatan politik dalam memperebutkan sumber-sumber kekuasaan di tingkat lokal. Selain itu, konflik yang terjadi mencerminkan sikap dan perilaku politik kekuatan politik lokal yang relatif masih belum siap. Hal ini dicerminkan belum siapnya infrastruktur pemilihan pejabat publik yang seringkali kontroversial, dipersoalkan oleh partai politik dan aktor politik serta kadang-kadang ditolak oleh masyarakat, bahkan oleh partai politik maupun anggota legislatif yang partainya kalah dalam pemilihan jabatan politik lokal<sup>1</sup>.

Secara teknis proses politik tentang pemilihan jabatan politik tingkat lokal telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 jo pasal 119 dan peraturan pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil

---

<sup>1</sup> Moch Nurhasim (Ed.), 2005, *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 2.

kepala daerah. UU No.32/2004 yang menekankan bahwa pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 56 ayat (1) serta melalui partai politik. Kewenangan partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah secara jelas tertuang pada Pasal 59 terutama pada ayat (1),(2),(3), (4), (5),(6) dan ayat (7) UU No. 32/2004.<sup>2</sup>

Namun realitasnya, walaupun pasangan calon terpilih oleh rakyat, sebagai proses politik lokal belumlah secara otomatis dapat ditetapkan sebagai proses yang final. Masih menunggu pengesahan dari pihak pemerintah pusat, gubernur terpilih oleh presiden. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 109 UU No 32/2004). Dan apabila pengesahan dari proses politik lokal tersebut masih ada perbedaan interpretasi dan kepentingan, maka hasil proses politik lokal akan menuai persoalan yang seringkali menimbulkan konflik lokal.

Konflik lokal seringkali disebabkan oleh aktor-aktor politik pusat terutama para pemimpin partai politik yang memaksakan kehendak dengan mendrop calonnya dari pusat atau paling tidak harus mendapat persetujuan dari pusat partainya. Bukan saja mendrop calon kepala daerah, kadang-kadang mereka mengamankan calonnya agar terpilih. Hal semacam ini menguatkan asumsi bahwa pemimpin elit politik di Jakarta telah memaksakan proses politik tingkat lokal. Dan tidak mengherankan kalau sampai calon dari partainya tidak terpilih, menggajal dengan berbagai cara dan argumen untuk menggagalkan calon terpilih

---

<sup>2</sup> Joko J. Prihatmoko.2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. LP3M Universitas Wahid Hasyim. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 1

yang seringkali membawa persoalan isu primordialisme, isu agama, ras, kultural ke arena politik lokal. Persoalan seperti itu sering menjadi argumen politik lokal yang jauh dari rasionalitas politik demokrasi.

Perkembangan politik lokal, sebenarnya cukup menarik karena selama masa pemerintahan otoriter di bawah rezim orde baru dan orde reformasi pemilihan kepala daerah selalu saja dikuasai dan ditentukan oleh sekelompok elit di Jakarta maupun oleh sekelompok elit yang duduk di parlemen daerah. Era otonomi daerah dengan menggunakan instrumen politik UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah berlangsung proses suksesi kekuasaan secara langsung dipilih oleh rakyatnya. Walaupun dalam implementasinya tak jarang masih memunculkan konflik politik. Namun yang jelas pilkada langsung telah terjadi interaksi politik antara elit politik dengan rakyat. Bahkan rakyat kadang-kadang dapat melakukan tekanan-tekanan yang bersifat kritis atas berbagai calon yang diusulkannya. Pergantian elit lokal, kadang-kadang menyebabkan terjadinya konflik, apalagi rakyat yang kehilangan identitas dan adanya ketidakadilan struktural akan mudah dimobilisasi ke arah konflik

Berbagai pengalaman pilkada langsung yang telah diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia, konflik yang terjadi antara lain: konflik antara kandidat dengan KPUD, konflik antar kandidat serta konflik antar pendukung. Konflik antara kandidat dengan KPUD dapat terjadi apabila kandidat menggunakan mekanisme legal untuk melawan keputusan KPUD. Pasal 106 UU Pemerintah Daerah disebutkan “Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa hasil penetapan perhitungan suara

Pilkada & Pilwakada dan KPUD.”<sup>3</sup> Sengketa pilkada yang menggunakan jalur ini dapat dilihat pada kasus Pilkada Jawa Timur dimana pasangan Khofifah-Mudjiono (Kaji) menggugat hasil keputusan KPUD Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi.

Konflik antar kandidat dapat terjadi apabila kandidat memiliki ketidakpuasan atas hasil penghitungan suara di beberapa daerah. Sengketa atau Ketidakpuasan ini diekspresikan menggunakan jalur yang disediakan oleh peraturan perundangan. Dalam pasal 112-114 PP No.6/2005 yang mengatur tahapan penyelesaian sengketa, Panwas akan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Bila tidak terjadi kesepakatan, maka Panwas akan membuat keputusan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sementara, bila terjadi laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, maka akan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian pemeriksaan dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pengalaman paling dekat mengenai Pilkada yang mengakibatkan konflik adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014. Hasil perhitungan suara KPUD Jatim yang memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam Pilkada Jatim putaran kedua. Lalu dibatalkan keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jatim putaran kedua yang dilakukan KPU Jatim tersebut pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) telah memperoleh

---

<sup>3</sup> Joko J. Prihatmoko.2005. Op.cit. Hal. 130

7.729.944 suara (50, 10 persen), sementara pasangan Kaji memperoleh 7.669.721 suara (49, 90 persen). Jumlah suara sah sebanyak 15.429.665, terdapat 506.343 suara tidak sah. Karsa unggul tipis 60.223 suara atau 0, 39 persen dibanding pasangan Kaji. Karena perbedaan yang tipis dalam perolehan suara, serta ada indikasi kecurangan itu yang menjadikan konflik kedua pasangan hingga ke meja-hijau Mahkamah Konstitusi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah proposal penelitian ini, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah

- 1. "Mengapa terjadi konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008"?**
- 2. "Bagaimana Resolusi konflik yang ditawarkan untuk menyelesaikan konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2008"?**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

**"Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyebab konflik calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam Pilkada langsung di Jawa**

**Timur dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008”.**

**”Mengetahui Resolusi Konflik yang digunakan guna menyelesaikan konflik calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam Pilkada langsung di Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008”.**

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif dan konstruktif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pihak Akademisi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi akademisi ilmu pemerintahan dalam pengembangan kajian tentang otonomi daerah dalam kaitannya dengan penyebab konflikpilkada

b. Pemerintah pusat dan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya resolusi konflik pada konflik pilkada.

c. Masyarakat pada umumnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepedulian masyarakat terhadap proses pilkada khususnya resolusi konflik pilkada yang akhirnya juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

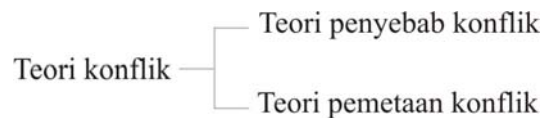
## **D. Kerangka Dasar Teori**

Dalam upaya menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi-politik untuk menjabarkan teori konflik, massa, pilkada dan beserta resolusinya.. Teori- teori ini relatif relevan dengan tema yang sedang dibahas. Teori-teori ini akan menjadi pisau analisis dalam membedah permasalahan berbagai faktor penyebab konflik dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini pasca Pilkada langsung di Jawa Timur tahun 2008.

### **1. Teori Konflik**

Pada penjelasan yang lebih lanjut tentang teori konflik yang akan dibahas. Menggunakan teori penyebab konflik dan teori pemetaan konflik. (Lihat pada Gambar 1.1)

**Gambar. 1.1.**



#### **a. Pengertian Konflik.**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian konflik adalah pertentangan; percekocan, pertentangan adalah perlawanan (yang berlawanan atau bertentangan); perselisihan yang sangat (ketidakcocokan dsb)<sup>4</sup>. Dalam Software WordWeb Dictionary, Konflik adalah suatu perselisihan terbuka antara

---

<sup>4</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 1251

dua kelompok atau individu yang berlawanan (*An open clash between two opposing groups or individuals*)<sup>5</sup>

Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama<sup>6</sup>.

Teori Konflik menurut Dahrendorf, melihat keteraturan yang terdapat dalam masyarakat, berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya, oleh mereka yang berada di atas<sup>7</sup>. Kedudukan orang di dalam masyarakat atau kelompok tidak sama, karena ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang tergantung. Max Weber, mendefinisikan kuasa sebagai sifat-sifat dan kondisi-kondisi seseorang yang memberikan kemungkinan padanya untuk memaksakan kemauannya pada orang lain sekalipun orang lain tidak setuju<sup>8</sup>. Meskipun tidak disukai, konflik merupakan suatu hal yang niscaya terjadi di dalam kelompok masyarakat manapun. Masyarakat yang menghindari konflik adalah masyarakat yang tidak akan mengalami perubahan dan kemajuan apapun.

Suatu konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik berdimensi sosial bisa diartikan sebagai perjuangan dan pertentangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, keistimewaan tradisi, dan sumber

---

<sup>5</sup> Software WordWeb Dictionary, Princeton University

<sup>6</sup> Ramelan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 145

<sup>7</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Prenada Media, Jakarta, hal. 155

<sup>11</sup> Karel J. Veeger, dkk, 1993, *Pengantar Sosiologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 93



daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tapi juga mengamankan, menetralkan, melukai atau mengurangi kualitas-kuantitas saingan-saingan mereka. Bila politik didefinisikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka pola ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Siapapun yang menduduki posisi sosial tinggi maka dia berkesempatan untuk berkuasa dan lebih mudah menjadi pemimpin politik. Menurut Deliar Noer, politik adalah segala usaha, tindakan, atau suatu kegiatan manusia dalam meraih kekuasaan suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah, atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat<sup>9</sup> Tindakan itu potensial memunculkan pergesekan antar kelompok yang berujung pada konflik dan polemik..

Lebih jauh dalam aspek politik, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan. Pengertian konflik di sini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan<sup>10</sup>

Menuru teori *Biological and psychological theories*. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar (internal dan Eksternal) individu tersebut. Ketika kebutuhan pribadi ditranformasikan kedalam interaksi politik, maka prilaku individu akan menjadi bersifat politik.

*Conflict has an inside and an outside dimension. It arises out of the internal dimensions of individuals acting singly or in the groups, and also*

---

<sup>9</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Terj. Helly P. Soecipto dan Sri Moelyati Soecipto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal. 21

<sup>10</sup> Moch Nurhasim (Ed.), 2005, *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta. Hal. 14

*out of external conditions and social structures. At all levels of analysis, large organisasi aggregates of human being affect smaller aggregates and individualis, and vice versa.*<sup>11</sup>

#### b. Teori Penyebab Konflik.

Ada berbagai teori penyebab konflik, misalnya teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berada dalam suatu masyarakat. Sedangkan teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan-perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Teori transformasi yang menganggap konflik terjadi karena masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial budaya dan ekonomi.<sup>12</sup>

Dalam pendekatan sosiologi-politik, konflik disebabkan oleh pertentangan antara elit politik. Konflik biasanya disebabkan pada keadaan dimana seseorang atau kelompok dengan identitas yang jelas, terlibat pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih kelompok lain karena kelompok ini mengejar atau berusaha mencapai tujuan. Pertentangan itu polanya dapat hanya sebatas pertentangan nilai, atau menyangkut klaim terhadap sesuatu (jabatan politik), kekuasaan dan atau sumberdaya-sumberdaya yang terbatas, serta dalam prosesnya sering ditandai oleh adanya upaya dari masing-masing pihak untuk saling menetralisasi, menyederai, hingga mengeliminasi posisi/eksistensi

---

<sup>11</sup> James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1990. *Contending theories of international relation*. Harper collins publishers. Hal. 274

<sup>12</sup>S.N. Kartikasari (Ed), 2000. *Mengelola konflik keterampilan & strategi untuk bertindak*. The British Council, Jakarta. Hal. 8

rival/lawannya.<sup>13</sup> Konflik merupakan suatu pertumbuhan antara dua atau lebih dari dua pihak, yang masing-masing mencoba menyingkirkan pihak lawannya dari arena kehidupan bersama atau setidaknya menaklukkannya, dan mendegradasikan lawannya keposisi yang paling ter subordinasi.<sup>14</sup>

Menurut A. Zaini Basri bahwa pada umumnya, ragam penyebab konflik pilkada bersumber pada tiga penyebab, yakni masalah politik uang, persoalan administrasi pencalonan dan sengketa penghitungan suara.<sup>15</sup> Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis penyebab konflik dalam kehidupan masyarakat, pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga penjelasan politik<sup>16</sup>.

Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa terdapat masalah serius bila hanya menekankan penjelasan konflik dari aspek budaya

---

<sup>13</sup> Coser, 1956:3

<sup>14</sup> Soetandyo Wingjosoebroto, 2006. Konflik: Masalah Fungsi dan pengelolaannya.... makalah disampaikan dalam Diskusi *Pengelolaan dan Antisipasi Konflik di Jawa Timur*, yang diselenggarakan dewan pakar Provinsi Jawa T imur, Tanggal 14 Juni 2006 dibalitbang Provinsi Jawa Timur, Hal 2

<sup>15</sup> Lili Romli. *potret otonomi daerah dan wakil rakyat ditingkat lokal*. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2007. hal. 347

<sup>16</sup> Moch Nurhasim (Ed.), 2005, Op.cit . hal. 107.

semata. Pendekatan budaya tidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi.<sup>17</sup>

Dalam pandangan budaya, pemakaian simbol budaya merupakan sarana yang efektif untuk menjalin ikatan untuk menyatukan kepentingan dan bertindak secara bersama-sama. Selain itu untuk tujuan politik, baik untuk melakukan mobilisasi massa atau memecah belah massa, mekanisme penggunaan simbol primordialisme telah terbukti cukup berhasil<sup>18</sup>.

Penjelasan konflik dari sisi ekonomi, Frances Stewart mengemukakan empat hipotesis. Hipotesis tersebut oleh Stewart dipakai untuk menganalisa sebab-sebab peperangan antar negara. Keempat hipotesis tersebut adalah,

- i) motivasi kelompok dan kesenjangan horisontal;
- ii) motivasi perorangan;
- iii) kontrak sosial yang gagal;
- iv) hipotesis perang hijau. Keempat hipotesis tersebut juga dipakai oleh Stewart untuk menjelaskan dari sisi politik<sup>19</sup>.

Banyak studi ekonomi dan politik untuk mempelajari akar masalah konflik memperlihatkan bahwa motivasi kelompok dan kesenjangan horisontal menyebabkan pertikaian antarkelompok. Satu sama lain ingin menunjukkan identitas budaya yang dimiliki dan dimensi kesenjangan horisontal selalu melibatkan masalah sosial, politik dan ekonomi. Apabila hal tersebut tercampur

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid, hal. 108.

dengan kepentingan ekonomi dan politik, maka akan menyebabkan eskalasi konflik yang lebih besar disertai dengan tindak kekerasan<sup>20</sup>.

Konflik di satu sisi memang menimbulkan dampak destruktif. Di sisi lain konflik juga dapat memberikan keuntungan bagi individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini motivasi perorangan berperan cukup penting dalam menciptakan konflik. Konflik sengaja dipakai untuk menaikkan posisi tawar yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi atau politik atau kedua-duanya. Istilah aktor intelektual, merujuk kepada konteks ini. Seperti konflik antar suku yang dimotivasi menaikkan seseorang ke tampuk kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Terlepas pendekatan motivasi pribadi atau perorangan kurang dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang konflik, namun tidak bisa dinafikan motivasi perorangan berperan penting dalam konflik<sup>21</sup>.

Konflik berarti pula sebagai bentuk kontrak sosial yang gagal, baik antara suku yang berbeda, atau antara rakyat dengan negara. Hipotesis Stewart tentang kontrak sosial bertolak dari pandangan bahwa stabilitas sosial secara implisit berangkat dari premis bahwa terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah. Kontrak sosial tersebut dapat dilihat penerimaan wewenang pemerintah oleh rakyat sepanjang kewenangan tersebut dipakai untuk memberikan layanan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Tekanan penduduk, seperti telah dikemukakan di atas, menyebabkan kelangkaan sumberdaya dan kerusakan lingkungan, dan berdampak menciptakan kemiskinan sebagai bentuk kesenjangan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Pendekatan

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

hipotesis perang hijau menjelaskan bahwa kekayaan dan kemiskinan mendorong orang untuk bertikai untuk memperoleh kendali terhadap pemanfaatan lingkungan<sup>22</sup>.

### c. Pemetaan Konflik

Dalam menyelesaikan konflik banyak cara yang dapat digunakan, beberapa alat bantu dan teknik dapat dilakukan. Untuk dapat mengetahui situasi dengan baik kita bisa menggunakan cara Pemetaan konflik. Pemetaan konflik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis. Menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka bersama. Mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.<sup>23</sup>

## 2. Resolusi konflik

Resolusi konflik sebagai bidang spesialis tersendiri mulai berkembang pada pasca perang dingin. Penyelesaian konflik juga dihadapkan dengan tantangan baru.<sup>24</sup>

Bidang ini mulai muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an, pada puncak perang dingin, kepada pengembangan senjata nuklir dan konflik antara Negara Adikuasa tampaknya mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Sekelompok pelopor dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda melihat manfaat mempelajari

---

<sup>22</sup> Ibid, hla. 108.

<sup>23</sup> Hand out mata kuliah *Negosiasi dan resolusi Konflik*. Dosen Arrohman Mardiansyah. S.IP.

<sup>24</sup> Hugh miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. Op.cit. Hal. 1

konflik sebagai sebuah fenomena umum, yang terjadi dalam hubungan Internasional, politik dalam negeri, hubungan industri, komunitas, keluarga dan antar individu. Mereka Melihat potensi untuk mengaplikasikan pendekatan-pendekatan potensial dengan latar belakang hubungan industri dan mediasi komunikasi kepada konflik secara umum, termasuk konflik sipil dan internasional.<sup>25</sup>

Stewart memformulasikan resolusi konflik melalui mekanisme politik yang inklusif dan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif. Politik inklusif bertujuan mengurangi dominasi politik satu kelompok dan mendistribusikannya kepada kelompok lain, dengan demikian membuka peluang partisipasi politik yang luas dari berbagai kelompok atau kalangan yang berbeda<sup>26</sup>.

Model kedua resolusi konflik adalah implementasi sistem sosial dan ekonomi inklusif. Sama halnya dengan politik inklusif, model ini bertujuan mengurangi kesenjangan horisontal. Kebijakan sosial dan ekonomi inklusif mencakup sektor pemerintah dan sektor swasta Dalam sektor pemerintahan, kebijakan yang dikeluarkan diarahkan untuk mendistribusikan manfaat antarkelompok secara berimbang dalam hal bantuan dan pemberian layanan umum, seperti mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, layanan kesehatan, air dan sanitasi lingkungan, perumahan dan subsidi konsumen. Dalam sektor swasta, diferensiasi pendapatan dan kesempatan kerja berpotensi menjadi sumber konflik. Selain itu dalam sektor ini, intervensi kekuasaan politik, meski

---

<sup>25</sup> . Ibid hal. 1-2

<sup>26</sup> Pheni Chalid, 2005, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*, Kemitraan, Jakarta, hal. 109

tidak kentara, langsung atau tidak langsung turut menciptakan diferensiasi kelompok.<sup>27</sup>

Kalau konflik tidak bisa dihilangkan persoalannya kemudian adalah bagaimana konflik itu dikelola agar konflik menemukan dimensi etisnya. Dalam menjawab permasalahan ini para ahli terbelah ke dalam kelompok pasif dan konstruktivis. Kaum pasifis seperti Erasmus of Rotterdam (1514), Emeric Cruce (1623), William Penn (1681), John Belers (1710), dan Abbe de Saint-Piere (1712) berpendapat bahwa penggunaan instrumen kekerasan merupakan alternatif solusi masalah-masalah sosial yang selalu dihadapi umat manusia. Sedangkan kalangan konstruksionis berpendapat bahwa kekerasan sesungguhnya dapat dilenyapkan dalam perjalanan peradaban manusia. Lenyapnya beberapa produk sosial berupa kekerasan seperti perbudakan dan diskriminasi rasial bagi kaum konstruksionis merupakan contoh kemungkinan dilenyapkannya kekerasan dalam kehidupan umat manusia.<sup>28</sup>

Ada dua kerangka berpikir yang berusaha menjawab kemungkinan lenyapnya kekerasan dalam kehidupan manusia yang semakin beradab. Pertama, kerangka yang ditawarkan John Mueller (1989) dalam bukunya *Retreat From Doomsday: The Obsolence of Major War*. Dalam hal ini Mueller berpendapat bahwa pengalaman kekerasan traumatik yang dialami suatu bangsa dapat menghasilkan suatu kesadaran kolektif tentang perlunya menempatkan kekerasan bersenjata sebagai suatu kegiatan terlarang.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 110

<sup>28</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Op. Cit., hal 116.

<sup>29</sup> Ibid., hal 116.



Kerangka berpikir kedua adalah tesis Imanuel Kant tentang *democratic peace* yang antara lain menyatakan bahwa negara demokratis tidak pernah berperang dengan negara demokratis lainnya. Tesis ini mengandaikan bahwa perdamaian *demokratic* adalah sebuah kondisi yang memungkinkan lenyapnya konflik dan kekerasan dalam kehidupan bangsa-bangsa.

Kembali lagi persoalannya adalah pada bagaimana konflik harus dikelola bukan membiarkannya sedemikian rupa, walaupun konflik pada ujungnya akan menghasilkan kesadaran kolektif tentang perlunya menghindari kekerasan. Hal ini karena pengalaman traumatik sendiri sebenarnya perlu dicegah sedemikian rupa. Untuk itulah diperlukan model-model resolusi konflik. Dengan mengacu kepada negara multi etnis, Nurhasim menyodorkan lima model regulasi konflik.<sup>30</sup>

1. Model partisi, yaitu pemisahan secara tegas antara satu etnis dengan etnis lainn. Model ini jarang sekali digunakan dan hal ini hanya dimungkinkan apabila sebuah etnis benar-benar hidup terpisah dari garis demarkasi negara.
2. Model dominasi, yaitu satu dominasi etnis terhadap etnis lain, biasanya melalui kekerasan atau atau tindakan diskriminatif. Model ini mendasarkan pada asumsi kekerasan sebagai alternatif mengakhirin kekerasan lebih lanjut.
3. Melalui proses asimilasi. Model ini adalah bentuk halus dan maju dari model kedua yang dilakukan secara alami. Keempat melalui model konsolidasi. Model ini mengakui eksistensi setiap perbedaan

---

<sup>30</sup> Nurhasim, och. (Ed), 2005. Op.cit. hla. 67.

yang ada dan mencoba untuk mengharmonikan perbedaan perbedaan itu. Dalam model ini kelompok mayoritas bukan pihak yang menentukan dalam berbagai hal, tetapi berbagai ketentuan diputuskan berdasarkan konensus dan kompromi.

4. Memiliki keserupaan dengan model keempat, yaitu pengakuan terhadap semua etnis, tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya politis. Model ini disebut dengan sinkretisme. Negara dalam hal ini berusaha mengakomodasikan dan mengekspresikan berbagai perbedaan yang ada dan menganggap semua etnis yang ada memiliki posisi yang sama dan diperlakukan secara adil.

Versi lain tentang resolusi konflik adalah apa yang ditawarkan Johan Galtung. Galtung sebagaimana dikutip Nurhasyim menawarkan tiga model yang berkaitan satu sama lain yaitu peace keeping, peace building, dan peace making. Ketiga Kerangka model itu bisa dilihat dengan Tabel berikut ini.<sup>31</sup>

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Resolusi Konflik Versi Johan Galtung**

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peace keeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok pejuang atau militer
Pertentangan Kepentingan	<i>Peace Making</i> (aktivitas politik)	Pemimpin atau Tokoh
Struktur sosial dan Sikap Negatif	<i>Peace building</i> (aktivitas sosial ekonomi)	Masyrakat umum

Sumber: Nurhasyim. 2005

---

<sup>31</sup> Ibid

Model peace keeping (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. Peace building adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Peace building lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas. Karena itu lima hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini;<sup>32</sup>

Pertama, interaksi yang terjadi harus antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status. Kedua, adanya dukungan dari lingkungan sosial. Ketiga komunikasi terjadi secara intim (bukan kasual). Keempat proses komunikasi harus menyenangkan kedua pihak dan kelima, ada tujuan yang hendak dicapai bersama.

Sedangkan peace making adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa metode bisa dipilih pada tahapan negosiasi ini. Pertama, melalui kekerasan, kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif dilakukan pemerintah yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola negara termasuk rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik. Dalam kasus dimana negara tidak memiliki legitimasi, pendekatan konvensional pasti gagal dan harus dicari alternatif solusi melalui alternatif *dispute resolution* (ADR) yang berupaya menyelesaikan konflik

---

<sup>32</sup> Ibid hal. 70

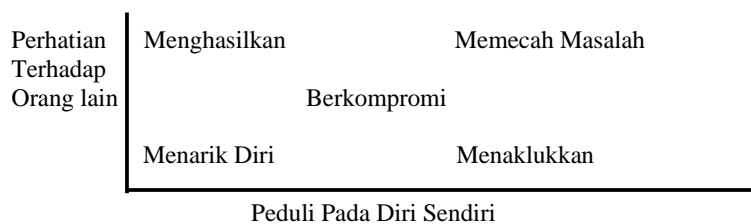
dengan cara langsung mengarah pada persoalan utama, kendati secara hukum illegal. Model ini juga dikenal sebagai *Interactive Conflict Resolution*.

Embrio resolusi konflik yang menghubungkan antara konflik, kekerasan dan kedamaian adalah pemikiran Johan Galtung. Galtung merupakan salah seorang pendiri are resolusi konflik ini. Pemahamannya yang luas mengenai akar-akar kekerasan struktural dan cultural sebagaimana telash sedikit disinggung di atas, sangat baik dan berguna bagi siapa saja yang ingin menggambarkan dan mengembangkan resolusi konflik secara relational, simetris dan psikologis.

Satu kebiasaan khas konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihanya sendiri Gambar Dibawah menggambarkan 5 pendekatan trhadap konflik.dibedakan oleh apakah perhatian bagi diri sendiri atau perhatian bagi orang lain.<sup>33</sup> ( lihat gambar 1.2)

**Gambar 1.2.**

**Lima Pendekatan untuk Konflik**



Apa yang terjadi ketika pendekatan Konflik bagi kedua pihak dipertimbangkan secara bersama-sama? Pihak yang bertikai biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara

<sup>33</sup> Hugh miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. Op.cit. hal. 8

diametrikal. Hasil yang diperoleh mungkin adalah hasil kalah-menang (satu pihak menang, satu pihak kalah) atau kompromi (mereka membagi perbedaan-perbedaan yang ada).

Penyelesaian konflik juga bisa diselaikan dengan teknik Negosiasi, Teknik negosiasi adalah suatu proses terstruktur digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu ketika masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Dalam banyak kasus negosiasi berlangsung tanpa keterlibat pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya berlangsung diantara kedua belah pihak pada tahap awal suatu konflik, ketika jalur komunikasi antara keduanya belum betul-betul putus, atau pada tahap ketika kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat dan rinciannya untuk mencapai penyelesaian secara damai.<sup>34</sup>

Kita juga bisa menggunakan teknik mediasi untuk menyelesaikan konflik, teknik mediasi seperti teknik negosiasi, mediasi juga merupakan bentuk keterampilan yang kita praktikkan setiap hari, tetapi kita tidak menyebutnya sebagai mediasi. Ketika dua orang berpendapat berbeda dan ada pihak ketiga, misalnya anggota keluarga atau teman ikut campur untuk melakukan klarifikasi masalah dan membicarakannya dari pada bertengkar, ini pun suatu bentuk mediasi. Ketika mediasi secara langsung gagal mencapai tujuannya dan jalur komunikasi kedua belah pihak terputus, ada peluang bagi pihak ketiga untuk ikut campur,

---

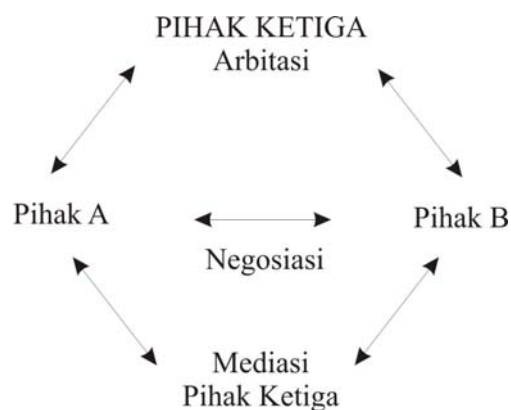
<sup>34</sup> Hand out, Arrohman Mardiyansyah . S.IP. Op. Cit..hal 2

pihak ketiga ini mungkin adalah sukarelawan, atau seorang yang diminta oleh kedua belah pihak untuk menjadi mediator. Dalam berbagai kejadian , mediator ini dipaksa oleh suatu organisasi atau suatu sistem, misalnay mediator dari PBB, namun prinsipnay mediator harus bisa diterima oleh kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Intervensi pihak ketiga, pihak ketiga adalah sebagai mediator yang tidak mempunyai kekuasaan, komunikasinya kuat, tetapi tidak mempunyai sumber kekuasaan miliknya sendiri. Dalam situasi lain mungkin ada pihak lain yang berkuasa yang dapat mengubah tidak hanya struktur komunikasi tetapi juga keseimbangan kekuasaan. Pihak ketiga seperti ini dapat mengubah prilaku pihak-pihak yang terlibat disamping juga komunikasi mereka dengan penggunaan yang bijaksana terhadap imbalan dan hukum (dorongan positif dan negatif), dan mereka dapat mendukung hasil yang satu dan bukan hasil yang lain. (lihat gambar 1.3)

**Gambar. 1.3.**

*Intervensi pihak ketiga dengan paksaan dan tanpa paksaan*

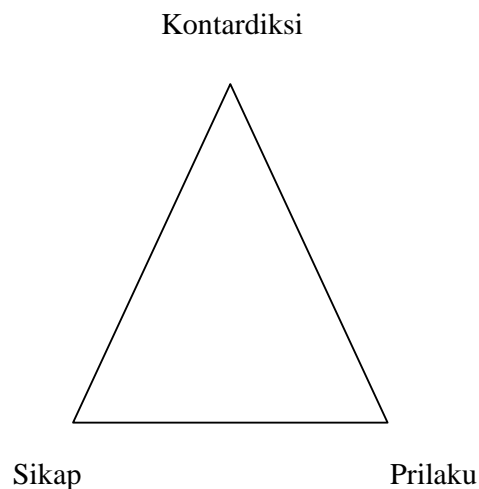


<sup>35</sup> Ibid hal. 5

Pada akhir tahun 1960an Galtung mengaju sebuah model konflik yang berpengaruh, yang meliputi konflik yang simetris ataupun tidak simetris. Dia menyatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi (C), sikap (A) dan perilaku (B) pada puncaknya (lihat gambar 1.4) disini kontradiksi yang merujuk pada dasar situasi konflik yang termasuk "ketidakcocokan tujuan" yang ada atau yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai yang disebabkan apa yang dinamakan sebagai "ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial" oleh Mitchell.<sup>36</sup>

**Gambar .1.4.**

**Segitiga Konflik**



*Sumber.* Galtung,1996

Dalam sebuah konflik yang tidak simetris, kontradiksi ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka dan benturan kepentingan inheren

---

<sup>36</sup> Ibid hal. 20-21

antara mereka dalam berhubungan. Sikap yang dimaksud termasuk persepsi pihak-pihak yang bertikai dan kesalahan persepsi antara mereka dan dalam diri mereka sendiri. Sikap ini dapat positif dan negatif tetapi dalam konflik dengan kekerasan, pihak-pihak yang bertikai cenderung mengembangkan stereotip yang merendahkan masing-masing dan sikap ini sering dipengaruhi oleh emosi seperti kekuatan, kemarahan, kepahitan dan kebencian, sikap ini termasuk element emotif (perasaan), kognitif (keyakinan) dan konatif (kehendak). Para analisis yang menekankan aspek subyektif ini dikatakan mempunyai pandangan ekspresif terhadap sumber-sumber konflik. Perilaku adalah komponen ketiga. Perilaku dapat termasuk kerja sama atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan dan serangan yang merusak. Para analisis yang menekankan aspek obyektif seperti hubungan struktural, kepentingan material atau perilaku yang bertentangan dikatakan mempunyai sumber-sumber konflik.<sup>37</sup>

Lebih jauh, karena beragamnya sumber konflik kontemporer dan keadaan politik darurat yang kompleks, maka diperlukan respon pada tingkat berbeda. Perubahan dalam konteks konflik dapat tergantung pada pengatur internasional dan regional, konflik didalam negara atau terhadap negara mungkin memerlukan perubahan struktural pada tingkat negara, konflik antara pihak-pihak yang bertikai akan tetap memerlukan pemecahan pada tingkat relasional, dan perubahan budaya pada semua tingkat mungkin perlu transformasi wacana dan institusi yang mempertahankan dan menghasilkan kembali kekerasan. Tekanan yang lebih besar

---

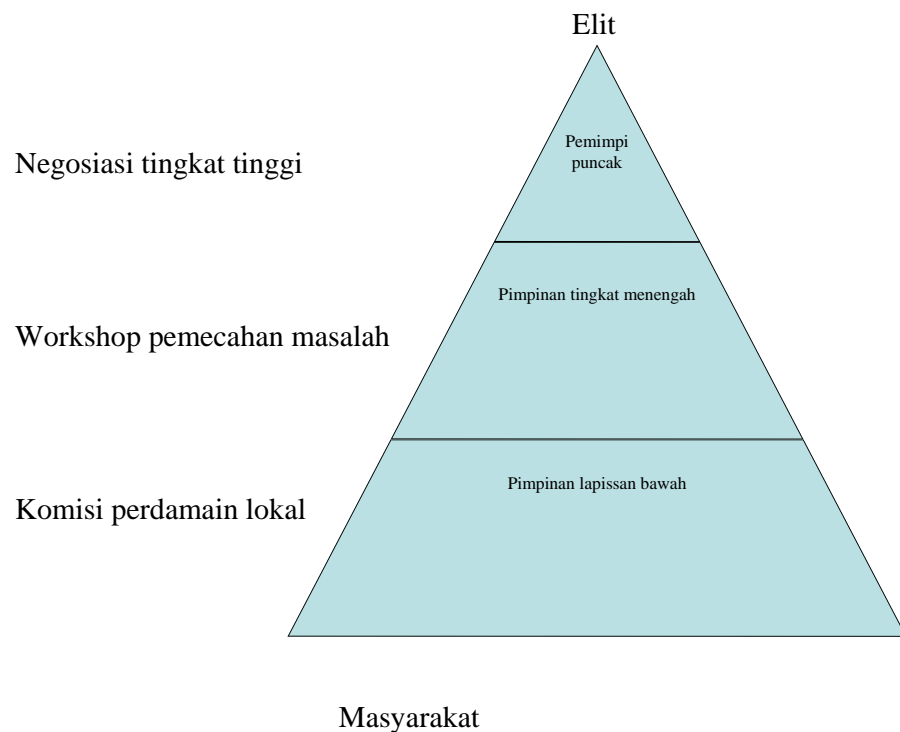
<sup>37</sup> Ibid hal. 21



sekarang ditempatkan pengintegrasian tingkat yang berbeda dimana pembentukan perdamaian dan penyelesaian konflik perlu bekerja dalam negara-negara yang terlibat, dengan tekanan khusus pada pentingnya proses “ dari bawah keatas”.<sup>38</sup> (lihat gambar 1.5)

**Gambar.1.5.**

***Aktor dan pendekatan untuk menciptakan perdamaian***



*Sumber.* From Lederach, 1997.

### **3. Pilkada**

Bentuk pemilihan langsung Kepala Daerah adalah hal baru yang menggantikan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Pilkada langsung dinilai sebagai kerangka system (*system framework*) bagi pelaksanaan partisipasi publik;

---

<sup>38</sup> Ibid hal. 26

legitimasi politik; akuntabilitas pemerintahan dan check and balance di satu sisi. Walaupun belum bisa sepenuhnya mampu menjawab persoalan *money politics* di sisi lain. Padahal persoalan inilah yang pada mulanya ingin dihilangkan dengan system pemilihan langsung ini.<sup>39</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pilkada merupakan perpanjangan agenda dari pemilu. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:<sup>40</sup>

a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi

---

<sup>39</sup> Joko J. Prihatmoko.2005 Op.cit. Hal. 10

<sup>40</sup> Laporan Departemen Dalam Negeri, <http://www.depdagri.go.id.>, diakses pada 26 Februari 2008.

b. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten

c. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

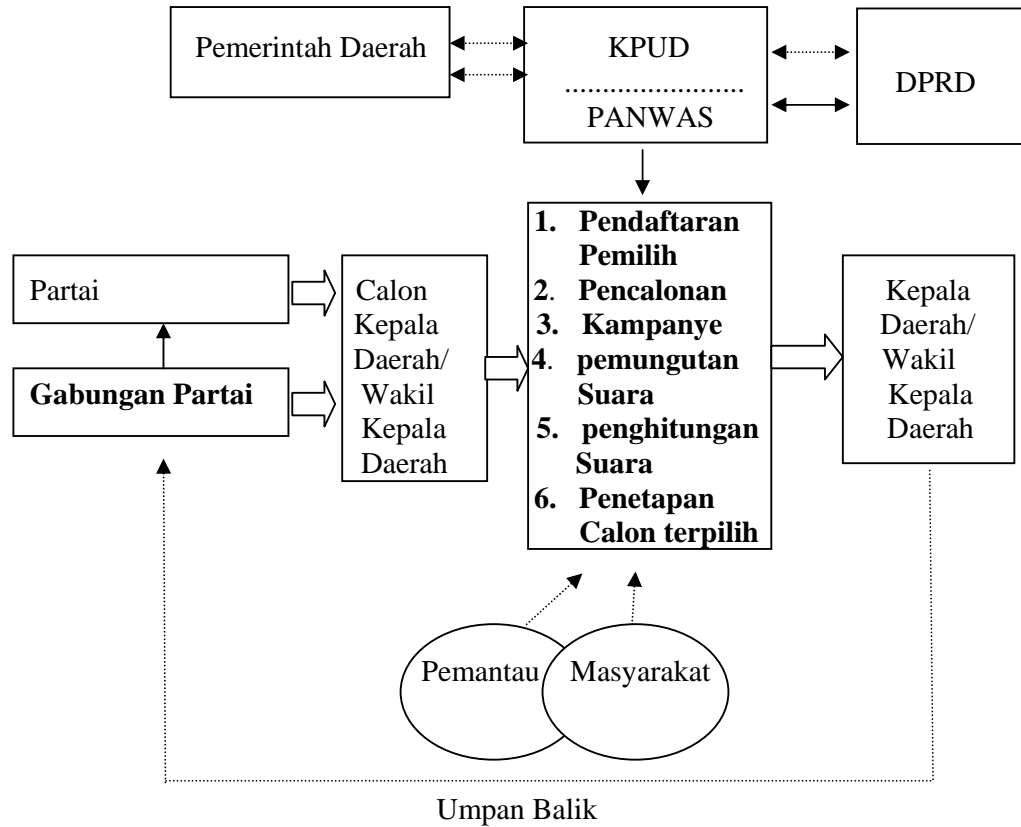
Sistem pemilihan secara langsung terdiri dari beberapa sub bagian, sub bagian sistem itu adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pendaftaran pemilih pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan calon terpilih. Masing-masing tahapan kegiatan terdiri dari sendiri-sendiri dan memiliki garis batas demarkasi yang tegas namun tidak dapat saling meniadakan dan bahkan saling melengkapi. (Lihat pada gambar 1.6)<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Joko J. Prihatmoko.2005.Op.cit. Hal. 305 dan 309

**Gambar. 1.6.**

**Model sistem pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia**



**E. Definisi Konseptual**

1. Konflik pilkada bersumber pada tiga penyebab, yakni masalah politik uang, persoalan administrasi pencalonan dan sengketa penghitungan suara. Konflik sengketa perhitungan suara pemilihan kepala daerah, antara pasangan calon kepala daerah dan KPUD dalam perbedaan jumlah perhitungan suara bisa saja terjadi.
2. Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang melibatkan rakyat secara langsung sebagai pemilih, penyelenggara, pengawas, dan sering kali akses

pencalonan terbuka untuk rakyat. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

3. Resolusi konflik adalah Metode untuk penyelesaian benturan-benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat, secara seimbang dan adil, untuk menuju arah pembangunan dan keadilan sosial.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Faktor Penyebab Konflik.:

#### a. Faktor Internal penyebab konflik antara lain :

- i). Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi.
- ii). Rapuhnya simbol perekat dan pemersatu yang mencakup nasionalisme, etnisisme, etika dan budaya politik yang luhur.
- iii). Sikap dan perilaku aktor politik yang tidak terkendali, menerabas dan terjerumus ke deviant politik.

#### b. Faktor Eksternal penyebab konflik antara lain.:

- i). Belum bakunya infrastruktur pemilihan pejabat publik.
- ii). Lemahnya institusionalisasi demokrasi di tingkat lokal (KPUD).

### 2. Resolusi konflik dan penyelesaian konflik Pemilihan Gubernur Jatim 2008.

- a. Melakukan pemungutan suara ulang.
- b. Melakukan pemilihan ulang.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data kualitatif kemudian memaparkan disertai memberi penjelasan mengenai fenomena tertentu.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti adalah konflik Pilkada Jawa Timur Tahun 2008.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang ditemukan atau dikumpulkan berupa kata-kata dan dokumen tertulis yang berkaitan langsung dengan konflik paska Pilkada di Jawa Timur tahun 2008. Oleh karena itu, data penelitian ini membutuhkan:

- a. Data primer: yakni, data yang diperoleh secara langsung tentang Pilkada Jawa Timur tahun 2008.
- b. Data sekunder: yakni, data yang diperoleh peneliti dari dokumentasi atau hasil penelitian terdahulu, yaitu data tentang fenomena konflik Pilkada di Indonesia.

### 3. Unit Analisa

Dalam penelitian ini unit analisisnya berupa sejumlah informasi yang didapat dari data primer dan sekunder. Data-data risalah sidang

---

<sup>42</sup> Mardalis, 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, hal..24

Mahkamah Konstitusi dan data yang diperoleh dari KPUD Jawa Timur yang berkaitan dengan konflik Pilkada Jawa Timur Tahun 2008.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Teknik Dokumentasi.

Untuk mengumpulkan yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu penulis menggunakan metode dokumentasi yang mencerminkan tindakan penulis dalam mengumpulkan data sekunder, yaitu sejumlah informasi yang berada di beberapa dokumen, baik pribadi maupun publik. Kesemua informasi yang penulis kumpulkan di beberapa dokumen berkaitan dengan permasalahan penelitian, tentang konflik pasca pilkada di Jawa Timur Tahun 2008.

##### b. Teknik Wawancara.

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara langsung sudut pandang, opini dan penilaian khususnya dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pilkada Jawa Timur tersebut.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun tahap analisa data penelitian ini adalah<sup>43</sup>:

- a. Menempatkan data-data ke dalam kategori-kategori. Dalam penelitian ini, kategori-kategori terdapat dalam teori konflik.

---

<sup>43</sup> Ibid, hal. 194

- b. Memperluas kategori sehingga didapat kategori data yang murni dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya.
- c. Mencari hubungan antarkategori, dan
- d. Menyederhanakan dan mengintegrasikan data ke dalam struktur teori yang koheren (masuk akal, saling berlingkutan dan bertalian secara logis).